

**KINERJA APARATUR DINAS PERDAGANGAN DALAM
MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi Kasus Di Taman Merdeka Kota Metro)**

(Skripsi)

Oleh:

Riki Mahdalena



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2019

ABSTRAK

KINERJA APARATUR DINAS PERDAGANGAN DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi Kasus Di Taman Merdeka Kota Metro) Oleh

Riki Mahdalena

Penertiban PKL sudah diupayakan sejak tahun 2010 di Kota Metro sampai saat ini belum teratasi dengan baik. Penertiban sudah dilakukan kembali, namun pada kenyataannya PKL masih banyak yang berdagang di taman merdeka. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui belum berhasilnya Aparatur Dinas Perdagangan dalam penertiban PKL di Taman Merdeka. Penelitian ini menggunakan teori Kinerja menurut Mahsun, terdapat empat indikator yaitu Input, Proses, Output, dan Outcomes. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena adanya Kinerja yang kurang pada beberapa Indikator. Pada Indikator Input yaitu Indikator Input (Masukan) yang meliputi lemahnya kebijakan akibat tidak memuat sanksi terhadap PKL. Pada Indikator Process (Proses) pengawasan kegiatan penertiban hanya dilakukan sekali dalam setahun. Kemudian Indikator Output (Keluaran) yaitu hasil jumlah PKL yang tidak mengalami penurunan, justru bertambah. Hanya pada satu indikator Outcomes (Hasil) telah dilakukan sosialisasi kepada PKL walaupun belum menghasilkan kesadaran PKL untuk tidak berdagang di Taman Merdeka.

Kata Kunci : Kinerja, Penertiban, Dan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

PERFORMANCE OF TRADE SERVICES' CIVIL SERVANTS OF METRO CITY GOVERNMENT IN DISCIPLINING THE STREET VENDORS AT MERDEKA PARK

By

Riki Mahdalena

Street-vendors disciplining has already been attempted since 2010 in Metro City until this recent time is not resolved properly. The disciplining has been processed again, but in fact there is still a lot of street vendors that operated at Merdeka Park. The purpose of this research was to find out the ineffectiveness of trade services' civil servants in disciplining the street vendors at Merdeka Park. This research used performance theories according to Mahsun, there are four indicators; inputs, processes, outputs, and outcomes. Therefore, this research uses a descriptive research method by applying qualitative approach. The results showed that the performance of the civil servants is not worked properly yet, due to less of performance on several indicators. On the input indicator; indicator input which includes its weak policy as the result of the policy is not contained within sanctions towards the street vendors. On the indicator of indicator processes, the monitoring activities of the discipline is only done once in a year. Later on, the output indicator as the result of the number of the street vendors is not decreased, it eventually increased. There was only one of the outcomes indicators which has done, a socialization has been given to the street vendors although it was not successful yet to make them aware to not operated at Merdeka Park in any further.

Keywords: Performance, Disciplining, And Street-vendors

KINERJA APARATUR DINAS PERDAGANGAN KOTA METRO DALAM
MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA

(Studi Kasus Di Taman Merdeka Kota Metro)

Oleh:

Riki Mahdalena

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

Ilmu Pemerintahan

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

2019

Judul Skripsi : **KINERJA APARATUR DINAS
PERDAGANGAN KAKI LIMA (Studi Kasus
Taman Merdeka Kota Metro)**

Nama Mahasiswa : Riki Mahdalena

Nomor Pokok Mahasiswa : 1346021027

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

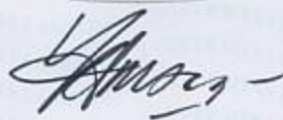


Dr. Feni Rosalia, M.Si
NIP. 19690219 199403 2 001



Drs. Denden Kurnia Derajat, M.Si
NIP. 19600729 199010 1 011

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

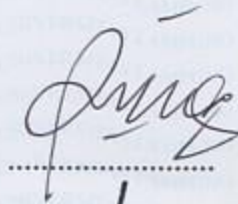


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP 19611218 198902 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si



Sekretaris : Drs. Denden Kurnia Derajat, M.SI



Penguji : Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarief Makhya, M.Si
NIP. 19590803 198603 1003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Januari 2019

PERNYATAAN

RIWAYAT HIDUP

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 24 Januari 2019

Yang membuat pernyataan



Riki Mahdalena

NPM. 134602127

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Riki Mahdalena, dilahirkan di Kota Metro pada tanggal 24 September 1995, penulis merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Sudiyono dan Krisnawati.

Jenjang pendidikan penulis Tk Muhammadiyah Kota Metro yang diselesaikan tahun 2001. Penulis

melanjutkan ke SD Negeri Pertiwi Teladan Kota Metro yang diselesaikan tahun 2007, lalu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Kota Metro dan lulus pada tahun 2010. Selanjutnya, penulis mengenyam pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 3 Kota Metro dan diselesaikan pada tahun 2013 dengan hasil yang memuaskan.

Pendidikan dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan jalur non reguler pada tahun 2013, dan diterima sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Lampung. Pada tahun 2016 di bulan Juli, penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Endang Rejo, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTTO

If you really want it, you'll find a way. But if you do not want it, you will only find excuses (tirta)

Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena tak semua bunga tumbuh dan mekar bersamaan.

PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Karya ini

Kepada

Kedua orang tuaku tercinta atas segala penantiannya, pengorbanannya dan do'a tulus yang tiada henti untuk keberhasilanku. Terimakasih yang tak terhingga untuk segala cinta kasih yang telah diberikan kepadaku.

Kakak-kakakku yang selalu memberikan doa dan dukungan tiada henti selama ini kepadaku.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu mendukungku.

Para Pendidik Tanpa Tanda Jasa yang Ku Hormati.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji hanyalah bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul “Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Taman Merdeka Kota Metro)” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagai akibat dari keterbatasan yang ada pada diri penulis. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Kedua orang tuaku dan kedua kakak ku, yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tiada henti sehingga penulis selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini demi kebahagiaan kedua orang tuaku tercinta.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai pembahas skripsi saya yang telah sabar dalam membantu penulisan skripsi ini.
4. Bapak Denden Kurnia Derajat, M.Si. selaku Dosen Pembimbing keduanya telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.si selaku Dosen Pembimbing utama yang memberikan kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Seluruh informan Dinas Perdagangan Kota Metro, serta pedagang kaki lima di taman merdeka.
8. Teman-teman Ilmu Pemerintahan 2013 terimakasih sudah memberikan canda dan tawa serta dukungan dan bantuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 24 Januari 2019

Riki Mahdalena

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah	10
C.Tujuan Penelitian	10
D.Manfaat Penelitian	10

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.Konsep Kinerja.....	11
1.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	12
2.Manajemen Kinerja	14
3. Pengukuran Kinerja	15
4.Tujuan Pengukuran Kinerja	16
5.Indikator Kinerja.....	17
B. Penertiban Pedagang Kaki lima(PKL).....	21
1. Faktor penghambat dan pendukung (PKL)	22
2.Tujuan Penertiban (PKL).....	24
3.Pedagang Kaki Lima (PKL).....	24
4.Pemahaman fungsi (PKL).....	27
5.Komponen pengaturan (PKL).....	29
C.Kerangka Pikir	31

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	35
B. Fokus Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian	38
D. Informan	39
E. Jenis data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	40
F. Teknik pengumpulan data	41

1. Wawancara	41
2. Observasi	42
3. Dokumentasi	43
G. Teknik pengolahan data	43
1. Editing data	44
2. Intepretasi data	44
H. Teknik analisis data	45
1. Pengumpulan data	45
2. Reduksi data	45
3. Tampilan Data	46
3. Membuat kesimpulan	46
I. Teknik keabsahan data	47
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Dinas Perdagangan	49
1. Sejarah Dinas Perdagangan	49
2. Tugas Dan Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan	50
3. Visi Dan Misi	51
B. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)	53
C. Taman Merdeka.....	55
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian Berdasarkan Wawancara	58
B. Pembahasan Hasil Wawancara	69
VI. SIMPULAN DAN SARAN	75
A. Simpulan	75
B. Saran	77

Daftar Pustaka

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pedagang Kaki Lima (PKL)	6
2. Informan	39
3. Data Primer	40
4. Data Sekunder	41

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Majunya perkembangan suatu Kota tentu tidak hanya di lihat dari pesatnya pembangunan di wilayah Kota tersebut. Tetapi dilihat bagaimana Kota tersebut mengatur pengendalian dan pemanfaatan Tata Ruang yang baik. Majunya perkembangan di suatu Kota dari segi ekonomi maupun pembangunan dapat menyebabkan orang orang dari daerah lain berdatangan di Kota tersebut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi yang datang hanya bermodalkan pendidikan yang rendah, oleh karena itu kebanyakan pendatang hanya bekerja pada sektor informal yang relatif mudah untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Para pelaku yang termasuk di dalam sektor informal bekerja untuk memperoleh pendapatan demi untuk kelangsungan hidup diri dan keluarganya, salah satunya adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang

kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mencari rezeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir perlintasan jalan raya.

Kota metro merupakan suatu Kota kecil yang tidak jauh dari Ibu Kota Lampung yaitu Bandar Lampung. Metro juga merupakan Kota yang nyaman, bersih, lestari, dan lingkungannya sehat. Hal ini dibuktikan dengan Kota metro mendapatkan penghargaan Adipura yang di berikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Walikota metro. Di Kota metro terdapat satu Taman Kota yang bernama Taman Medeka, yang sudah ada sejak tahun 1990. Keberadaan Taman tersebut terletak di tengah-tengah Kota, sebagai simbol Kota metro.

Taman Medeka Kota metro memiliki puluhan pohon rindang, hampir semua bagian di Taman itu terenuhi oleh rumput yang hijau dan suasana yang nyaman, sehingga banyak warga Kota metro dan luar Metro yang bersinggah di Taman, terutama pada hari sabtu dan minggu hampir seluruh Taman Medeka dipenuhi oleh pengunjung. Taman Medeka di Kota metro merupakan salah satu Ruang Terbuka Hijau yang juga di jadikan tempat rekreasi bagi masyarakat.

Banyaknya masyarakat yang berkunjung, kemudian hal ini di gunakan oleh PKL untuk berjualan atau berdagang di sekitar Taman. Sampai sekarang pedagang makin bertambah banyak di sekitar Taman Medeka. Untuk itu

Pemerintah Kota metro mengeluarkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota metro.

Jumlah ruang terbuka hijau di Kota metro tercatat seluas 1.188 hektar atau 17% dari luas wilayah Kota metro. Padahal nyata nya ketentuan jumlah ruang terbuka hijau minimal 30% luas wilayah yang ada, 1.88 hektar tersebut tersebar di 5 wilayah kecamatan Kota metro yang meliputi 22 Taman yaitu termasuk Taman Medeka pengelolaan Taman Medeka ini sendiri saat ini beralih fungsi menjadi area pedagang kaki 5. (sumber <https://lampungmediaonline.com/2016/10/rth-Kota-metro-hanya-17-persen/>)

Kondisi Taman Medeka terletak di jantung Kota metro berdekatan dengan area perkantoran dan area rumah Dinas Walikota Kota metro. Kondisinya sangat memprihatinkan terlihat sisa sampah dari pedagang yang berdagang di sekitar Taman. Terkadang karena banyak nya pedagang membuat para konsumen/pembeli membuat area Taman juga menjadi macet karena membeli makanan di sekitar trotoar .

Pemerintah Kota metro menyelenggarakan aktivitasnya melalui kerjasama antar Aparaturnya dan Dinas Perdagangan Dan Pasar Kota metro ikut terkait dengan masalah Penertiban di Kota metro. Kerjasama yang dilakukan dengan maksud agar Pemerintah Kota metro dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini Kota metro melakukan kerjasama antar instansi yang ada di daerahnya termasuk Dinas Perdagangan Dan Pasar Kota metro Metro dalam rangka memenuhi salah satu program pembangunannya yaitu Penertiban PKL .

Penertiban PKL sudah diupayakan sejak tahun 2010 di Kota metro sampai saat ini belum teratasi dengan baik, walaupun telah dilakukan upaya untuk mengatasi masalah dalam Penertiban tersebut. Tidak tertatanya lokasi PKL merupakan masalah kompleks karena selain merusak keindahan dan melanggar estetika ruang Kota, keberadaan PKL juga dapat menimbulkan kemacetan.

Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Gusthio Milando (2015) menyimpulkan bahwa hasil dari Penertiban PKL aparat pemerintah sudah melakukan sosialisasi terhadap penataan PKL di Taman Medeka dan pemerintah juga sudah berkerja sama dengan kesatuan polisi pamong praja agar mempermudah sosialisasi kepada pedagang dengan mudah.

Adanya faktor yang menghambat terjadinya Penertiban PKL di Taman Medeka dikarenakan tidak ada kesadaran hukum dari PKL, banyak dari mereka yang mengabaikan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah karena dilihat semakin hari banyak PKL yang memenuhi area Taman Medeka. Hasil yang didapat dari penelitian peran pemerintah Kota metro dalam penataan pedagang kaki lima di Taman Medeka Kota metro adalah, PKL aset baik untuk tiap Kota karena dapat menjadi pendapatan daerah jika dikelola dan dikembangkan dengan baik .

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Novia Beladina (2014) menyimpulkan bahwa koordinasi dinas perdagangan dan pasar dengan dinas

tata Kota dan parawisata, dan dinas perhubungan komunikasi infomatika Kota metro dalam Penertiban PKL telah terlaksana dengan baik meski demikian terdapat indikator yang belum terlaksana dengan maksimal yakni kesepakatan dan komitmen dalam menjalankan kegiatan Penertiban .

Selanjutnya ada penelitian yang telah dilakukan oleh Nurul Fatmita Putri (2015) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa implementasi kebijakan Penertiban PKL berbasis kebersihan dan keindahan, Pemerintah Kota metro selama ini sudah melakukan upaya-upaya yang cukup berarti dalam upaya penataan PKL di Kawasan Taman Kota metro dan untuk mengatasi dan mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.

Perbedaan penelitian penulis pada ketiga penelitian sebelumnya ialah penulis meneliti mengapa masih terjadi kegagalan terhadap Penertiban PKL di Taman Medeka sejak 2014 hingga sampai saat ini, padahal pemerintah sudah menyediakan tempat berupa bangunan yang bisa di tempati oleh PKL yang akan ditertibkan .

Kebijakan pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota metro Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota metro sudah berjalan namun belum efektif, seperti masih adanya penolakan yang terjadi saat pelaksanaan Penertiban PKL berlangsung

seharusnya bisa diatasi bila pemerintah Kota metro cukup tanggap terhadap berbagai tuntutan dari para PKL.

Pemerintah juga seharusnya bisa mengubah sikap menentang dari para PKL yang merasa dirugikan oleh kebijakan penataan PKL, menjadi sikap menerima agar dapat memungkinkan diperolehnya suatu dukungan dan umpan balik selama pelaksanaan penataan dilangsungkan. Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, keihklasan dan potensi unggulan Kota metro.

Awalnya memang masih sedikit PKL yang berjualan di sekitar Taman, tetapi seiring berjalannya waktu pedagang yang tadi nya hanya satu sampai empat orang, kini bertambah menjadi 83 pedagang yang rata-rata berjualan di pinggir jalan maupun di atas trotoar. Pejalan kaki pun sekarang menggunakan sebagian badan jalan untuk berjalan karena di trotoar sudah penuh dengan PKL.

**Tabel 1 Daftar Pedagang Kaki Lima
Sumber Data dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kota metro .**

No	Jenis makanan	Jumlah pedagang
1.	Depot rokok	7
2.	Makanan	56
3.	Minuman	20
	Jumlah	83

Taman Medeka Kota metro diperuntukan sebagai salah satu Ruang Terbuka Hijau (RTH), tetapi nyatanya dimanfaatkan PKL untuk berjualan di sekitar Taman Medeka. Keadaan yang demikian Pemerintah Kota metro mengeluarkan peraturan bahwa PKL dilarang berjualan di sekitar Taman Kota karena mengganggu Ketertiban Umum dan membuat Keindahan Ruang Terbuka Hijau.

Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan dan Pasar Kota metro PKL yang terdapat di Taman Medeka yaitu mencapai 83 PKL yang sudah di data aktif berjualan, tetapi setiap harinya ada pedagang yang datang ke kantor Dinas Perdagangan memberitahukan mereka aktif berjualan di sana dan ingin data nya di input sebagai pedagang aktif.

Aparatur Dinas Perdagangan Dan Pasar Kota metro saat ini sudah menegaskan dengan menertiban lagi para PKL yang berada di Taman Medeka mulai dari Penertiban yang meyebarkan surat edaran nomor : 331.1/9 /D-4/2017 Walikota metro Teantang Kebersihan, Dan Keindahan Taman Medeka Kota metro. Surat edaran tersebut diberikan kepada pedagang kaki lima (PKL) yang menempati area Taman Medeka .

Pemerintah kembali menegaskan dengan memberikan surat teguran nomor 510 / 691 / D-4/2017 agar pedagang bisa meninggalkan area Taman Medeka karena jika pedagang tidak meninggalkan area Taman Medeka maka akan diberikan sanksi sesuai dengan perda Kota metro No. 05 tahun 2010.

'Tolong digaris bawahi bahwa pemerintah ini bukan mengusir para PKL, melainkan melakukan Penertiban, pemerintah akan mengembalikan lahan di sekitar Taman Medeka sesuai fungsinya. Pasalnya, selama ini para PKL menggelar dagangannya di atas trotoar yang fungsinya sebagai tempat pejalan kaki. Oleh sebab itu, pemerintah akan membuat tempat lebih dahulu sebelum para pedagang dipindahkan. Ini bukan diusir tapi dipindahkan"

(http://www.lampost.co/artikel_detail.php?lampost=pedagang-kaki-lima-di-Taman-merdeka-metro-dipindahkan)

Penertiban PKL di Taman Medeka yang dilakukan Dinas Perdagangan Dan Pasar Kota metro Metro belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan, PKL tidak bersedia di relokasi ke tempat lain yang lebih cocok untuk berdagang dengan alasan akan mengurangi hasil mata pecaharian pedagang. Penertiban PKL di Kota metro sampai saat ini belum teratasi dengan baik. Permasalahan ini semakin mendapat perhatian, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang berkunjung ke Taman Medeka. Penertiban PKL yang dilakukan tersebut cenderung dipaksakan dan memperburuk keadaan.

Hal tersebut disebabkan bahwa pemerintah melakukan Penertiban tetapi belum memberikan solusi tempat berdagang yang tepat untuk PKL. Sehingga hal tersebut justru berujung pada Penumpukan PKL di Taman Medeka. Jumlah PKL di area Taman Medeka tidak mengalami perubahan, yang terjadi justru lokasi Taman Medeka semakin tidak teratur.

Sampai saat ini belum ada tindakan Penertiban kembali oleh Dinas Perdagangan Dan Pasar Kota metro dalam melakukan program pembangunan yaitu Penertiban PKL di Taman Medeka, Hingga pedagang dibiarkan

berdagang di pinggir jalan trotoar Taman Medeka. Kesemerawutan dan ketertiban PKL merupakan masalah yang dihadapi daerah perKotaan, baik Kota Besar maupun Kota Berkembang.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan hingga saat ini belum terlihat jelas keberhasilan yang diperoleh Aparatur Dinas Tata Kota. Karena pada kenyataannya PKL khusus nya di Taman Medeka masih belum tertata dengan baik. Menyadari adanya permasalahan tersebut, ada kebutuhan yang harus dilaksanakan dalam suatu kajian mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota metro yang kiranya dapat mempermudah satuan kerja yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yaitu menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Berdasarkan uraian di atas dan menurut Perda No.6 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 2 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota metro dan Perda No.5 Tahun 2010 Pasal 14 ayat 5(a) tentang Ketertiban Umum, Kebersihan dan Keindahan Kota metro maka penulis mengajukan skripsi dengan judul : “ **Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Taman Medeka Kota metro)** “.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

“Mengapa Kinerja Dinas Perdagangan Dan Pasar Kota metro dalam Penertiban PKL di Taman Medeka belum berhasil?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk mengetahui belum berhasilnya Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Dan Pasar Kota metro Metro dalam Penertiban PKL di Taman Medeka .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan .

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Aparatur Dinas Perdagangan Dan Pasar Kota metro dalam Penertiban PKL (PKL) di Taman Medeka.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Beberapa definisi kinerja dari beberapa tokoh, definisi tersebut antara lain:

Menurut Mahsun (2012:81) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning.

Menurut Sembiring (2012:82) Kinerja merupakan hasil kerja dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber daya, data dan informal, kebijakan, dan waktu tertentu yang digunakan disebut sebagai masukan.

Dari berbagai definisi diatas peneliti menyimpulkan pengertian kinerja merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, visi serta organisasi. Pada dasarnya pengertian kinerja berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menjalankan apa yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Efektifitas dan Efisiensi Menurut Sondang dalam Fahmi (2011:24) Bila suatu tujuan tertentu akhirnya bisa dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut efektif tetapi apabila akibat-akibat yang tidak dicari kegiatan menilai yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan kepuasan walaupun efektif dinamakan tidak efisien. Sebaliknya, bila akibat yang dicari-cari tidak penting atau remeh maka kegiatan tersebut efisien Otoritas (Wewenang).

- a. Menurut Sembiring (2012:27) Otoritas menurut adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam suatu organisasi formal yang dimiliki seorang Aparatur organisasi kepada Aparatur yang lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya
- b. Disiplin Menurut Sembiring (2012:27) Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana dia bekerja.
- c. Inisiatif Inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas dalam membentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan

tujuan organisasi. Menurut Anwar P. Mangkunegara (2006:16), terdapat dua faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu :

1. Faktor Individu.

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:

- a. Kemampuan mereka
- b. Motivasi
- c. Dukungan yang diterima
- d. Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan
- e. Hubungan mereka dengan organisasi.

2. Faktor Lingkungan Organisasi.

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai kinerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja

yang harmonis, iklim kerja yang respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

2. Manajemen Kinerja

Menurut Fahmi (2011:2) manajemen kinerja adalah suatu ilmu yang memadukan seni didalamnya untuk menerapkan suatu konsep manajemen yang memiliki tingkat fleksibilitas yang representative dan anspiratif guna mewujudkan visi, misi perusahaan dengan cara mempergunakan orang yang ada di organisasi tersebut secara maksimal.

Sedangkan Mangkunegara (2010:19) manajemen kinerja adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan di komunikasikan secara terus-menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasannya langsung. Menurut Dharma (2005:1) manajemen kinerja adalah suatu proses yang dirancang untuk meningkatkan kinerja organisasi, kelompok, dan individu yang digerakan oleh para manajer.

Pada dasarnya manajemen kinerja adalah suatu proses yang dilaksanakan secara sinergi antara manajer, individu, dan kelompok terhadap suatu pekerjaan di dalam organisasi. Secara khusus manajemen kinerja ditujukan untuk meningkatkan aspek-aspek kinerja meliputi Sasaran yang dicapai. Kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, efektivitas kerja.

Menurut Wibowo dalam Fahmi (2011:3) penerapan manajemen kinerja merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerjasama secara harmonisasi dan terintegrasi antara pemimpin dan bawahannya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa manajemen kinerja adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi organisasi, kelompok, dan individu yang digerakan oleh pemimpinnya dengan memahami dan mengelola kinerja.

3. Pengukuran Kinerja

Hasil akhir pengukuran kinerja adalah informasi tentang kinerja, apakah kinerja individu, kinerja kelompok atau unit dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kejelasan informasi tentang hal-hal yang akan diukur baik bagi individu, kelompok maupun organisasi secara keseluruhan, haruslah menjadi kesepakatan bersama, maka dengan demikian hal itu berpengaruh pada motivasi, sikap dan perilaku setiap Aparatur organisasi, selanjutnya hal tersebut berdampak pada kinerja organisasi. Penyebab sukses dan kurang sukses organisasi dalam mencapai kinerja di klasifikasikan oleh Bacal dalam Sembiring (2012:83) menjadi dua yaitu:

- a. Faktor-faktor individual
- b. Faktor-faktor sistem.

Faktor-faktor individual adalah semua faktor yang bersumber dari individu pegawai termasuk pimpinan. Faktor-faktor sistem yaitu semua faktor yang berada dan besumber di luar kendali para pegawai secara individual. Untuk

itu, Bacal dalam Sembiring (2012:83) mengemukakan langkah-langkah diagnosa atau peningkatan kinerja sebagai berikut :

- a. Mengetahui adanya kekurangan dalam kinerja
- b. Mengenali kekurangan itu dan tingkat keseriusannya
- c. Mengidentifikasi hal-hal yang memungkinkan menjadi penyebab kekurangan, baik yang berhubungan dengan sistem maupun yang berhubungan dengan itu sendiri.
- d. Mengembangkan rencana tindakan, untuk menanggulangi penyebab kekurangan itu
- e. Melaksanakan rencana tindakan tersebut

4. Tujuan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mempunyai tujuan pokok yaitu untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Adapun tujuan umum pengukuran kinerja adalah Pengukuran kinerja menurut Mardiasmo dalam Sinambela (2012:187) mempunyai tiga tujuan, yaitu:

- a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Tujuan Pengukuran Kinerja menurut Mahsun dalam Sembiring (2012:85) mempunyai tiga tujuan yaitu :

- a. Membantu memperbaiki kinerja agar kegiatan terfokuskan pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. Pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Mewujudkan pertanggung jawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
- d. Mengetahui tingkat pencapaian tujuan organisasi.
- e. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai.
- f. Memperbaiki pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan.
- g. Memotivasi pegawai.
- h. Menciptakan akuntabilitas publik.

5. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja yang efektif diperlukan untuk menjalankan kegiatan kinerja agar dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh lembaga/instansi yang menjalankan suatu kegiatan. Indikator kinerja yang efektif dapat dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan yang baik. Pada dasarnya indikator kinerja yang efektif merupakan suatu hal untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi/instansi dari pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi dari instansi yang terkait. Oleh sebab itu, kinerja yang efektif merupakan analisis atas keberhasilan dan kegagalan setiap instansi dalam berkoordinasi.

Mahsun (2014:196) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sebagai berikut :

1. Indikator inputs (masukan) meliputi SDM dan kebijakan yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan organisasi . Indikator ini lebih terukur, akan tetapi indikator ini tidak akan menunjukkan data dan informasi yang akurat, jika dalam proses pengukuran dilakukan sembarangan. Indikator inputs dibutuhkan agar mengetahui pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik atau tidak yang kemudian akan menghasilkan keluaran dari pelaksanaan pengukuran kinerja.
2. Indikator Proses melalui proses manajemen kinerja yaitu berfungsi sebagai perencanaan penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana yang strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Proses dalam rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya. Dengan melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan.
3. Indikator Outputs (keluaran) menunjukkan hasil kerja yang dilalui dengan langkah proses pengukuran kinerja. Keluaran dalam pengukuran kinerja akan menjadi sesuatu yang diharapkan langsung

dan dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau nonfisik.

4. Indikator Outcomes (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang diperoleh dari keluaran suatu kegiatan yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung.
5. Indikator Benefits (manfaat) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan kinerja baru bisa diketahui dalam jangka menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan secara tepat waktu dan berfungsi penuh yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. Indikator Impact (dampak) menggambarkan dampak yang diperoleh dari indikator manfaat bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dalam perencanaan kinerja apakah berdampak positif maupun negatif.

Dari beberapa indikator yang dikemukakan ahli tersebut, peneliti menggunakan indikator kinerja menurut Mahsun dalam menilai kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Kota Metro. Indikator ini digunakan oleh peneliti karena indikator ini menilai kinerja aparatur dari aspek mulai dari masukan, proses, keluaran, hasil. Dengan begitu akan didapatkan bagaimana hasil pengukuran kinerja organisasi yang lebih akurat. Namun dari enam

indikator yang dikemukakan oleh Mahsun tersebut, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan empat indikator diantaranya, yakni:

1. Indikator Masukan (Input) yang merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Melalui indikator ini yang menjadi ukuran adalah kompetensi SDM, kebijakan serta sarana dan prasarana dan waktu dalam melakukan perencanaan kinerja. Masukan dalam pengukuran kinerja dalam Penertiban PKL di Taman Merdeka mengetahui kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan sarana yang sudah diberikan sebagai solusi dari Penertiban sudah digunakan oleh pedagang yang ditertibkan.
2. Indikator Proses (Process) merupakan ukuran kegiatan bagaimana langkah dalam perencanaan kegiatan kinerja aparatur pemerintahan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan. Hal-hal yang menjadi ukuran dalam indikator ini yaitu prosedur pelaksanaan kegiatan dan standar waktu dalam mengawasi kegiatan Penertiban PKL.
3. Indikator Keluaran (Output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung yang dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik, yang menjadi keluaran (output) dalam penelitian ini adalah jumlah PKL yang akan ditertibkan.

4. Indikator Hasil (Outcome) merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Dalam penelitian ini keluaran adalah apakah Penertiban berjalan dengan baik sehingga tidak adanya hambatan dalam Penertiban PKL dan menghasilkan tujuan dalam Penertiban yaitu menjadikan Taman Merdeka sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

B. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Selain Aparatur Dinas Perdagangan yang bertugas Aparatur Dinas Perdagangan juga bekerja berdasarkan instruksi yang diberikan kepada Aparaturnya sebelum memberikan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan undang undang No 5 tahun 2010 tentang ketertiban umum, kebersihan dan keindahan. Aparatur Dinas Perdagangan harus terlebih dahulu melakukan tindakan berupa surat teguran kemudian dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungan.

Dalam melaksanakan Penertiban Pedagang Kaki Lima ada hal-hal yang harus dipatuhi oleh Aparatur Dinas Perdagangan yaitu memberikan penyuluhan untuk tidak melakukan tindakan kekerasan seperti membentak apalagi sampai memukul dalam melakukan Penertiban, hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan seperti instruksi yang diberikan kepada

mereka untuk lebih melakukan pendekatan secara persuasif dimana sebelum menangkap atau menertibkan.

Aparatur Dinas Perdagangan harus terlebih dahulu menanyakan identitas diri Pedagang Kaki Lima. Komunikasi Aparatur Dinas Perdagangan dengan Pedagang Kaki Lima sebelum melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima dapat dilihat dari setiap Aparatur saling respon yang ditunjukkan pedagang saat dijalkannya Penertiban di lapangan. Komunikasi antara Aparatur dan pedagang ini menjadi faktor penting agar Dinas Perdagangan dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik

1. Faktor Pendukung dan Penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima

1. Peraturan Daerah Kota Metro No 5 tahun 2010 tentang Ketertiban Umum,Keindahan dan Kebersihan menyatakan bahwa untuk mewujudkan Kota Metro yang indah dan berseri di perlukan upaya dari masyarakat dan Aparatur Pemerintah untuk memelihara Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Kelestarian lingkungan sehingga perlu di lakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah .
2. Pelaksanaan koordinasi, monitoring,evaluasi dan pembuatan laporan setiap bulan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan, peningkatan kondisi lokasi yang di tertibkan maka perlu adanya laporan kegiatan bulanan yang harus rutin

dilaporkan sehingga akan lebih mudah mengetahui hasil dari kegiatan penertiban itu dilaksanakan.

3. Penegakan sanksi bagi PKL yang melanggar peraturan. Salah satu cara yang efektif untuk mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL yaitu dengan memberikan sanksi retribusi yang berupa denda dan dapat menahan barang dagangannya hingga batas waktu yang bersangkutan memenuhi denda tersebut.

Faktor Penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima

1. Jumlah PKL yang setiap hari nya bertambah dan memenuhi trotoar di sekitar Taman Merdeka karena mereka merasa sudah menetap kan mata pencaharian di sekitar Taman Merdeka dan itu menyangkut perekonomian para pedagang
2. Dalam pelaksanaan operasional Penertiban Pedagang Kaki Lima Taman Merdeka adalah ikon Kota Metro dan sejauh ini untuk saran fasilitas operasionalnya masih kurang tempat yang sudah di siapkan Pemerintah belum memadai untuk menampung para PKL yang akan di tertibkan ke tempat yang lebih layak untuk berdagang .
3. Kurangnya peran aktif masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban itu sendiri. Masyarakat sebagai pengguna pasar belum memiliki rasa tanggung jawab untuk ikut ambil

2. Tujuan dari Penertiban tersebut adalah :

1. Mewujudkan adanya tertib lingkungan yang serasi yang meliputi ketertiban umum dan kebersihan lingkungan
2. Berfungsinya sarana kelengkapan kota agar sesuai dengan fungsinya
3. Terwujudnya lokasi tempat usaha bagi pedagang kaki lima yang sesuai dengan peruntukan tata ruang dan perencanaan kota
4. Tumbuhnya wiraswasta yang tangguh, mandiri dan kuat
5. Terpenuhinya kebutuhan pembeli/masyarakat sesuai dengan pertumbuhan kota dan gaya hidup masyarakat perkotaan

3. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima dikategorikan sebagai jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas khususnya sebagai usaha kecil-kecilan yang kurang teratur. Istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sendiri mengarah pada konotasi pedagang barang dagangan dengan menggelar tikar di pinggir jalan, atau di muka-muka toko yang dianggap strategis. Latar belakang seseorang menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) menurut Alisjahbana adalah karena:

PKL termasuk kedalam lapangan pekerjaan sektor informal yang merupakan unit berskala kecil di dalam produksi dan distribusi barang-barang dan yang memasuki sektor itu terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan yang besar. Istilah kaki lima merupakan lantai yang diberi atap sebagai

penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua yaitu lantai atau tangga dimuka pintu atau tepi jalan.

Arti yang kedua ini lebih merujuk bagi bagian depan rumah toko, dimana dijamin silam telah terjadi kesepakatan antara perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. istilah PKL merupakan peninggalan dari zaman penjajahan inggris.

Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar diukur dengan feet atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kaki yaitu kira-kira 31 cm, sedangkan lebar trotoar lima kaki atau 1,5 m lebih sedikit. pedagang kaki lima yaitu pedagang kecil yang berjualan disuatu tempat umum seperti tepi jalan, taman-taman, emper-emper toko atau lokasi yang bukan milik mereka tanpa adanya surat izin usaha dari pemerintah. Ciri-ciri pedagang kaki lima itu sendiri yaitu barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu.

Karafir menggolongkan pedagang kaki lima menjadi enam kelompok yaitu :

1. Pedagang sayuran dan rempah
2. Pedagang klontong
3. Pedagang makanan dan minuman
4. Pedagang tekstil dan pakaian
5. Pedagang surat kabar
6. Pedagang rokok dan makan ringan

Dapat dikatakan bahwa PKL merupakan gambaran yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari sehingga orang menggelar barang dagangannya dipinggir jalan, teras-teras toko, trotoar, taman kota, halaman atau lapangan pada sebuah pasar. Beberapa alasan yang dilakukan oleh PKL untuk melaksanakan kegiatan ekonominya antara lain :

1. Mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya termasuk dalam golongan yang tidak mampu, berpendidikan rendah atau biasanya para migran
2. Cakrawala mereka nampaknya terbatas pada pengadaan kesempatan kerja dan menghasilkan pendapatan yang langsung bagi diri sendiri.

PKL di kota terutama harus dipandang sebagai unit-unit berskala kecil yang terlibat produksi dan distribusi barang-barang yang masih dalam proses evaluasi daripada dianggap sebagai suatu perusahaan yang berskala kecil dengan masukan-masukan modal dan pengolahan yang besar. Menurut Buchari Alma ciri-ciri PKL yaitu :

1. Kegiatan usaha tidak terorganisasi
2. Tidak memiliki surat izin usaha
3. Tidak teratur dalam kegiatan usaha
4. Bergerombol di trotoar atau tepi-tepi jalan protokol, dipusat-pusat dimana banyak orang ramai
5. Menjalankan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang sambil berlari mendekati konsumen

4. Pemahaman Fungsi Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan suatu kelengkapan kota-kota di seluruh dunia dari dahulu. Sebagai kelengkapan, pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari atau ditiadakan, karena itu kalau ada suatu pemerintah kota berkehendak meniadakan pedagang kaki lima akan menjadi kebijaksanaan atau tindakan yang sia-sia. Pedagang kaki lima bagi sebuah kota tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dan budaya.

Sebagai salah satu fungsi ekonomi, pedagang kaki lima tidak semestinya hanya dilihat sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli secara mudah. Tidak pula hanya dilihat sebagai lapangan kerja tanpa membutuhkan syarat tertentu. Dan tidak pula dilihat sebagai alternatif lapangan kerja informal yang mudah terjangkau akibat suatu keadaan ekonomi yang sedang merosot. Tidak kalah penting, melihat pedagang kaki lima sebagai pusat konsentrasi kapital sebagai pusaran yang menentukan proses produksi dan distribusi yang sangat menentukan tingkat kegiatan ekonomi masyarakat dan negara. Sebagai sebuah fungsi sosial, pedagang kaki lima tidak semestinya hanya dilihat sebagai pedagang atau penjahat yang serba lemah, tidak teratur, berada ditempat yang tidak dapat ditentukan, mengganggu kenyamanan dan keindahan kota, karena itu harus ditertibkan oleh petugas kota.

Sebagai suatu gejala sosial, pedagang kaki lima menjalankan fungsi sosial yang sangat besar. Merekalah yang menghidupkan dan membuat kota selalu

semarak, tidak sepi, dan dinamik. Dalam pola dan sistem tertentu, pedagang kaki lima merupakan daya tarik tersendiri bagi sebuah kota. Demikian pula dari sudut budaya, pedagang kaki lima menjadi pengemban budaya, bahkan menjadi model budaya kota tertentu.

Melalui pedagang kaki lima, karya-karya budaya diperkenalkan kepada masyarakat. Selain itu, pedagang kaki lima merupakan gejala budaya bagi sebuah kota dan menciptakan berbagai corak budaya tersendiri. Pandangan holistik atau integral semacam ini diperlukan dalam menentukan kebijaksanaan dan mengatur pedagang kaki lima pada sebuah kota sehingga hubungan “mutual” yang positif antar “mission” pemerintah dengan kehadiran pedagang kaki lima.

Pola hubungan semacam itu akan menjadi dasar hak dan kewajiban dan hubungan tanggung jawab antara pedagang kaki lima dengan pemerintah kota. Menurut Mc Gee dan Yeung (2007:76) pola ruang aktivitas pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor formal dalam menjangkau konsumennya.

Lokasi pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh hubungan langsung dan tidak langsung dengan berbagai kegiatan formal dan informal atau hubungan pedagang kaki lima dengan konsumennya. Untuk dapat mengenali penataan ruang kegiatan pedagang kaki lima maka harus mengenal aktivitas pedagang kaki lima melalui penyebaran,

pemanfaatan ruang berdasarkan waktu berdagang dan jenis dagangan serta sarana berdagang.

5. Komponen pengaturan penataan fisik pedagang kaki lima

Komponen pengaturan penataan fisik pedagang kaki lima, antara lain meliputi lokasi, waktu berdagang, sarana fisik dagangan, jenis dagangan, pola penyebaran, pola pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Lokasi

Berdasarkan hasil studi oleh Ir. Goenadi Malang Joedo (1997:63), penentuan lokasi yang diminati oleh sektor informal atas pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

- a. Terdapat akumulasi orang yang melakukan kegiatan bersama-sama pada waktu yang relatif sama, sepanjang hari.
- b. Berada pada kawasan tertentu yang merupakan pusat-pusat kegiatan perekonomian kota dan pusat non ekonomi perkotaan, tetapi sering dikunjungi dalam jumlah besar.
- c. Mempunyai kemudahan untuk terjadi hubungan antara pedagang kaki lima dengan calon pembeli, walaupun dilakukan dalam ruang relatif sempit.
- d. Tidak memerlukan ketersediaan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

Mc Gee dan Yeung (2007:108) menyatakan bahwa pedagang kaki lima beraglomerasi pada simpul-simpul pada jalur pejalan yang lebar dan 1

tempat yang sering dikunjungi orang dalam jumlah besar yang dekat dengan pasar public, terminal, daerah komersial.

2. Waktu berdagangan.

Menurut Mc Gee dan Yeung (2007:76) dari penelitian di kota-kota di Asia Tenggara menunjukkan bahwa pola aktivitas pedagang kaki lima menyesuaikan terhadap irama dari ciri kehidupan masyarakat sehari-hari. Penentuan periode waktu kegiatan pedagang kaki lima didasarkan pula atau sesuai dengan perilaku kegiatan formal. Adapun perilaku kegiatan keduanya cenderung sejalan walaupun pada saat tertentu kaitan aktivitas keduanya lemah atau tidak ada hubungan langsung antara keduanya. Sarana fisik dagangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan Mc Gee dan Yeung (2007:82-83) di kota-kota di Asia Tenggara ditemukan bahwa bentuk sarana fisik dagangan pedagang kaki lima umumnya sangat sederhana dan biasanya mudah untuk di pindah-pindah atau mudah untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jenis sarana dagangan yang digunakan pedagang kaki lima sesuai dengan jenis dagangan yang dijajakan.

3. Jenis dagangan.

Menurut Mc Gee dan Yeung (2007:82-83) jenis dagangan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi pula oleh aktivitas yang ada disekitar kawasan dimana pedagang kaki lima beraktivitas. Misalnya di kawasan perdagangan, maka jenis dagangannya juga beraneka ragam seperti makanan atau minuman, kelontong, pakaian dan lain-lain.

4. Pola penyebaran.

Menurut Mc Gee dan Yeung (2007:76) pola penyebaran pedagang kaki lima dipengaruhi oleh aglomerasi dan aksesibilitas sebagai berikut

- a. Aglomerasi, aktivitas pedagang kaki lima selalu akan memanfaatkan aktivitas-aktivitas di sektor formal dan biasanya pusat-pusat perbelanjaan menjadi salah satu daya tarik lokasi sektor informal untuk menarik konsumennya. Para pedagang kaki lima cenderung melakukan kerja sama dengan pedagang kaki lima yang sama jenis dagangannya atau saling mendukung seperti pedagang makanan dan minuman.
- b. Aksesibilitas, para pedagang kaki lima lebih suka berlokasi di sepanjang pinggir jalan utama dan tempat-tempat yang sering dilalui pejalan kaki.

C. Kerangka Pikir

Dinas Perdagangan Kota Metro merupakan Instansi Pemerintahan yang di tunjuk oleh Pemerintah untuk melaksanakan Penertiban Ruang di wilayah Kota Metro dalam konteks Ketertiban Umum dan Kebersihan,Keindahan. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan Dinas Perdagangan Kota Metro dalam melakukan Ketertiban maka di lakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di wilayah Taman Merdeka Kota Metro, Oleh karena itu dilakukan penilaian kinerja terhadap Penertiban PKL yang di lakukan oleh Aparatur Dinas Perdagangan Kota Metro.

Dalam melakukan penilaian kinerja tersebut hanya menggunakan empat indikator kinerja menurut Mahsun (2014:196) yaitu Masukan (Input), Proses (process), keluaran (output), hasil (outcomes) dalam mengukur Kinerja Dinas Perdagangan Kota Metro yang melaksanakan Penertiban Pedagang dalam konteks Ketertiban dan Kebersihan,Keindahan di Taman Merdeka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan ke empat indikator tersebut lebih cocok untuk melihat dari kebijakan dalam Penertiban PKL sampai aparatur menjalankan kegiatan tersebut dan apa yang dihasilkan selama Penertiban berlangsung. Maka Indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai berikut:

A. Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, bahan, kebijakan, waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan organisasi . Dalam indikator ini berkaitan dengan tugas pokok Dinas Perdagangan dalam melakukan Penertiban PKL karena adanya kebijakan yang diberikan kepada PKL dengan diberikan nya Surat Edaran namun kebijakan tersebut belum efektif untuk membuat PKL pergi dari Taman Merdeka.

B. Indikator Proses melaksanakan kegiatan yang didukung oleh sumber daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasas. Salah satu yang dilakukan Aparatur dalam proses Penertiban dengan sekali

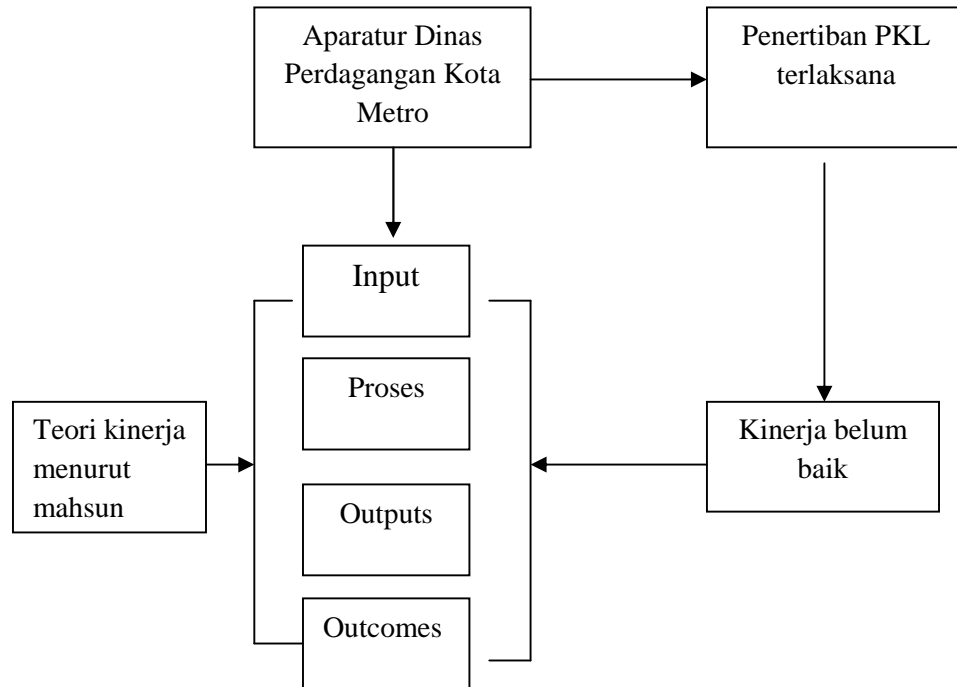
pengawasan untuk memberikan peringatan kepada PKL agar tidak berdagang.

C. Indikator Outputs (keluaran) menunjukkan hasil kerja apakah berupa barang atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses.

D. Indikator Outcomes (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang diperoleh dari keluaran suatu kegiatan.

Dengan menggunakan model indikator kinerja tersebut dapat dilihat bagaimana Kinerja Aparatu Dinas Perdagangan Kota Metro dalam pelaksanaan Penertiban PKL dalam konteks Ketertiba Umum dan Kebersihan . Untuk lebih mudah memahami inti dari penelitian ini, maka penulis menggambarkan dalam bentuk kerangka pikir.

D. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1 bagan Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2012:9), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode ini digunakan untuk meneliti objek pada kondisi yang alamiah, dimana penulis adalah instrumen kunci dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif dan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011:222).

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian ini akan menitik beratkan pada upaya untuk memberikan deskripsi

(gambaran) umum mengenai kinerja aparatur Dinas Perdagangan dalam menangani penataan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sekita taman merdeka Kota Metro. Yang mana masih banyak terdapat masalah yang timbul pada penataan pedagang, mengenai keluhan yang dirasakan oleh beberapa masyarakat yang berdagang berkaitan dengan kinerja Dinas Perdagangan atau aparatur pemerintah di Kota Metro.

B. Fokus Penelitian

Untuk memperjelas pemahaman tentang konsep-konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah indikator kinerja yang meliputi indikator masukan (input), indikator process (proses), indikator outputs (keluaran), indikator hasil (outcomes) untuk mendeskripsikan kinerja aparatur Dinas Perdagangan dalam penertiban PKL di Taman Merdeka Kota Metro. Mahsun (2014:196) mengemukakan bahwa indikator kinerja dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi sebagai berikut :

1. Inputs (masukan) untuk mengetahui segala hal yang menunjang pemerintah Kota Metro melakukan penertiban PKL di kawasan Taman Merdeka, dalam penelitian ini hal yang akan dilihat adalah :
 - Mengetahui kebijakan atas dilakukan kegiatan penertiban PKL sesuai dengan perda Kota Metro yang bernomor 05 tahun 2010 tentang kebersihan, keindahan dan ketertiban umum.

- Mengetahui pengeluaran surat edaran dari waliKota Metro dalam penertiban PKL di Taman Merdeka.
2. Process (proses) untuk mengetahui upaya upaya pemerintah Kota Metro dalam melakukan penertiban di Taman Merdeka dari mulai sosialisasi sampai di tertibkan nya PKL di Taman Merdeka, dalam penelitian ini hal yang akan dilihat adalah :
 - Menjelaskan bagaimana proses kinerja aparatur dinas perdagangan dalam melakukan penertiban PKL di Taman Merdeka.
 3. Outputs (keluaran) untuk mengetahui hasil kinerja pemerintah dan hambatan hambatan dilakukan nya penertiban PKL di Taman Merdeka
Dalam penelitian ini hal yang akan dilihat adalah :
 - Menjelaskan bagaimana hasil kinerja yang sudah tercapai dalam dilakukan nya penertiban dan apasaja hambatan yang terdapat dalam proses penertiban.
 4. Outcomes (hasil) menjelaskan bagaimana kinerja pemerintah Kota Metro khusus nya Aparatur Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Kota Metro dalam menjalankan penertiban PKL sebagaimana menjadikan kawasan Taman Merdeka sebagai ruang terbuka hijau. Dalam penelitian ini hal yang akan dilihat adalah :
 - Mengukur kinerja pemerintah dengan melihat hasil penertiban yang sudah dilakukan sejak tahun 2010 tersebut

Penelitian menentukan fokus penelitian ini untuk membatasi penelitian agar mendapatkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan yang menjadi fokus dalam penelitian ini . Dengan menggunakan model indikator kinerja tersebut diharapkan dapat dilihat bagaimana Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Metro dalam melaksanakan Penertiban PKL di Taman Merdeka. Apakah masalah-masalah penertiban ini sudah ditangani dengan baik sehingga dapat menciptakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Merdeka.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian terutama sekali dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi, dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2007: 127). Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kantor Dinas Perdagangan Kota Metro. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena aparatur Dinas Perdagangan berwenang dalam melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di sekita Taman Merdeka Kota Metro. Lokasi penelitian berada di Jalan Kyai H. Arsyad No.3, Metro, Metro Pusat, Kota Metro, Lampung

Adapun alasan penulis mengambil studi pada kantor Dinas Perdagangan metro karena sebagai aparatur pemerintahan di Kota Metro yang menangi tentang keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah di Kota Metro, khususnya pedagang kaki lima yang berada di Taman Merdeka Kota Metro.

D. Informan

Informan adalah orang-orang atau pihak yang terkait dan dinilai memiliki informasi tentang Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Metro Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Taman Merdeka. Dalam menentukan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Penentuan teknik ini agar didapati informasi dengan tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. Peneliti menetapkan beberapa kelompok informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 2 Informan Penelitian
Diolah Peneliti (2018)**

No	Nama	Jabatan
1	Budi Dwi Radiastanto	Kepala bagian pembinaan dan penata pedagang
2	Puspita Rini	Staff dinas perdagangan
3	Sherly	Pedagang Kaki Lima
4	Sinta	Pedagang Kaki Lima

E. Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini yang dimaksud adalah subjek darimana data yang diperoleh. Data yang diperoleh dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data Primer, yaitu berupa kata-kata dan tindakan yang bersumber dari informan serta peristiwa-peristiwa tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama

berada di lokasi penelitian. Data primer diperoleh peneliti sebagai hasil dari proses pengumpulan data dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam dan observasi dari Aparatur Dinas Perdagangan Kota Metro dan PKL di Taman Merdeka. Data primer dalam penelitian ini sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan
1	Budi Dwi Radiastanto	Kepala bagian pembinaan dan penataan pedagang
2	Puspita Rini	Staff pembinaan dan penataan pedagang
3	Sinta	Pedagang kaki lima di taman
4	Sherly	Pedagang kaki lima di taman

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis yang terkait dengan Kinerja Dinas Perdagangan Metro Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Taman Merdeka. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian, yaitu gambaran umum mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL), foto-foto dokumentasi, data data yang terkait mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL). Data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 3 Data Sekunder
Diolah Peneliti (2018)**

No	Sumber
1	Surat Keputusan Walikota No :331.1/9/D-4/2017 tentang Kebersihan Dan keindahan Taman Merdeka Kota Metro
2	Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemerdayaan pedagang kaki lima
3	Peraturan daerah Kota Metro nomor 05 tahun 2010 tentang ketertiban umum kebersihan dan keindahan Kota Metro
4	Peraturan daerah Kota Metro nomor 01 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Metro 2011-2031
5	Data pedagang kaki lima (PKL)

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode atau teknik pengumpulan data dengan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (Sugiyono, 2011:225)

1. Wawancara

Menurut Nasution wawancara (interview) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan

memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan pada fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara kepada informan agar menjadi terarah. Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan kinerja aparaturnya dinas perdagangan Kota Metro dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Taman Merdeka sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

Wawancara tersebut dilakukan dengan cara bertemu langsung dan melakukan wawancara langsung dengan bapak budi dwi radiastanto selaku kepala bidang pembinaan dan penataan pedagang, selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu puspita rini selaku staff bidang pembinaan dan penataan pedagang, agar mendapat data yang valid maka peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima (PKL) di Taman Merdeka.

2. Observasi

Peneliti melakukan observasi atau pengamatan dengan cara peneliti secara langsung berkunjung ke lokasi penelitian yaitu Taman Merdeka Kota Metro. Observasi sudah mulai dilakukan sejak 29 maret 2018. Melalui observasi peneliti mencari informasi yang lebih banyak dengan melihat mengapa PKL di Taman Merdeka enggan di tertibkan ke tempat yang sudah disediakan pemerintah.

Ketika melakukan observasi peneliti juga mencocokkan informasi yang telah didapat dari informan setelah melakukan wawancara. Observasi dilakukan dengan cara mengamati dan dokumentasi PKL di Taman Merdeka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Terkait penelitian ini, dokumen yang dibutuhkan antara lain: peraturan-peraturan, data-data mengenai pedagang, surat edaran tertanda dari waliKota Metro, serta data dari pihak terkait dengan objek penelitian yaitu Aparatur Dinas Perdagangan Kota Metro.

G. Teknik pengolahan data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, tahap selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengolah data tersebut. Adapun kegiatan pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Editing data

Editing data yakni proses di mana proses melakukan keterbacaan konsistensi data yang sudah terkumpul. Tahapan Editing yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi mengenai proses penertiban, sumber daya, disposisi dan komunikasi dalam kinerja aparatur dinas perdagangan Kota Metro dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Merdeka dalam mewujudkan ruang terbuka hijau (RTH) serta kebersihan, keindahan dan ketertiban umum

2. Intepretasi data

Intepresi data yaitu data yang telah di deskripsikan baik melalui tabel maupun narasi yang telah di interpretasikan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan mengenai mengenai proses penertiban, kebijakan yang diterapkan dalam kinerja aparatur dinas perdagangan Kota Metro dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Merdeka .

Dalam penelitian ini kutipan wawancara yang ditampilkan merupakan penyerderhanaan atau penafsiran terhadap maksud dan arti dari informasi yang disampaikan. Interpretasi data dilakukan dengan cara menghubungkan hasil wawancara dengan informasi dengan teori-teori pada tinjauan dan dokumen lainnya, sehingga dapat diperoleh analisis yang tepat.

H. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013:119-120) tahapan-tahapan analisis data adalah :

1. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data yaitu seluruh kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini adalah melakukan pra-Riset. Dalam kegiatan pra-Riset ini, peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan hasil kinerja aparatur melalui wawancara langsung dengan pedagang kaki lima di Taman Merdeka Kota Metro. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan penilaian kinerja aparatur Dinas Perdagangan Metro.

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah kegiatan proses pemilihan, pemilahan, focusing dan penyederhanaan data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Kegiatan mereduksi data yang telah dilakukan dalam penelitian ini meliputi : perekapan hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi baik yang berhasil direkam melalui recorder maupun catatan-catatan lapangan dan hasil pengumpulan dokumen yang berhubungan dengan fokus penelitian. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dipilih dan diseleksi, serta difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penilaian serta hasil kinerja yang dimiliki aparatur Dinas Perdagangan pasca penataan pedagang kaki lima di Taman Merdeka Kota Metro.

3. Tampilan Data (Data Display)

Tampilan data yaitu kegiatan penyajian data atau informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan. Pada penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto. Tetapi, yang paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif.

4. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan. Pada penelitian ini, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan dicari pola, tema serta hal-hal yang sering muncul, yang dituangkan dalam kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data hasil penemuan di lapangan dengan teori-teori yang diusulkan dalam Bab Tinjauan Pustaka, serta dengan pengambilan intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan observasi, wawancara, serta dokumentasi.

I. Teknik Keabsahan Data

1. Teknik Memeriksa Derajat Kepercayaan (credibility)

Dalam penelitian ini, kriteria keabsahan data yang digunakan adalah kriteria derajat kepercayaan, penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin yang dikutip dalam Moleong (2007:332) membedakan empat macam

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1. Triangulasi data peneliti menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen dan arsip dari pihak yang terkait dalam permasalahan yang peneliti bahas tersebut.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Perdagangan Kota Metro

1. Sejarah Dinas Perdagangan Kota Metro

Dinas Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro.

Tahapan pembentukan Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dimulai pada tanggal 27 April 1999 hingga 31 Desember 2000 yang pada saat itu bernama Dinas Pasar Kota Metro. Kemudian pada tanggal 1 Januari 2001 hingga 11 Agustus 2003 Dinas Pasar Kota Metro berubah menjadi Sudin Pasar pada Dinas Tata Kota dan Lingkungan Hidup Kota Metro. Hingga pada akhirnya yaitu tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2003 kembali menjadi Dinas Pasar Kota Metro, dan kemudian menjadi Dinas

Perdagangan dan Pasar Kota Metro berdasarkan Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2010.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Perdagangan Kota Metro

Dinas perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perdagangan Kota Metro mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

Seksi Pembinaan Dan Penataan Pedagang

Seksi pembinaan dan penataan pedagang mempunyai tugas, melaksanakan Pembinaan, Penyuluhan, Pendataan Pedagang, serta menyelenggarakan kemandirian dan ketertiban pedagang dan pasar.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pembinaan dan penataan pedagang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan bahan kebijakan teknis bidang pembinaan dan penataan pedagang;
- b. Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, sosialisasi dan pendataan serta melakukan penataan, pengamanan dan Penertiban pedagang atau lokasi tempat usaha bagi pedagang dan atau sarana prasarana dan asset pedagang;
- c. Pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas dan petugas keamanan, dan ketertiban serta petugas penataan pasar;

- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap petugas keamanan;
 - e. Menganalisa kebutuhan petugas keamanan dan ketertiban pasar serta mengangkat dan memberhentikan petugas Satpam Pasar;
 - f. Pencatatan, pelaporan dan pengkoordinasian kejadian dan peristiwa keamanan dan ketertiban serta penataan pedagang dan tempat usaha bagi pedagang kepada dinas/instansi/lembaga lain
 - g. Pengupayaan kebutuhan sarana dan prasarana dan perlengkapan kerja petugas keamanan, ketertiban dan penataan pedagang;
 - h. Penyusunan rencana dan petunjuk teknis pelaksanaan pemeliharaan keamanan, ketertiban pasar dan operasi penataan pedagang;
 - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Visi dan Misi

A. Visi

Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Pasar Kota Metro telah merumuskan visi, dan visi tersebut adalah “Perdagangan dan pasar yang berdaya saing”.

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

- a. Perdagangan adalah upaya berniaga baik berupa barang maupun jasa yang diedarkan atau ditawarkan dari pihak produsen atau pedagang kepada pihak konsumen atau pembeli.
- b. Sedangkan pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk.
- c. Daya saing adalah kemampuan pelaku usaha maupun pengelola pasar untuk berkompetisi melalui peningkatan kualitas dan inovasi secara kompetitif.

B. Misi

Untuk mengimplementasikan visi di atas maka diwujudkan dalam bentuk misi-misi yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum perkantoran.
- b. Perlindungan terhadap konsumen.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pasar tradisional dan pasar sehat.
- d. Meningkatkan PAD serta kualitas pelayanan publik.
- e. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban pasar.

4. Struktur Organisasi

B. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Metro

Walikota Metro membentuk Tim Pemindahan dan Penataan serta Tim Penjagaan Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima Di Taman Merdeka untuk meningkatkan ketertiban tempat berusaha Pedagang Kaki Lima, dan terpenuhinya kenyamanan dan kerapihan tempat usaha dagang serta tergambaranya peta wilayah pasar dan terhimpunnya data potensi usaha/perdagangan. Tugas dari Tim Pemindahan dan Penataan serta Tim Penjagaan Keamanan dan Ketertiban Pedagang Kaki Lima Metro adalah :

- a. Melakukan inventarisasi pedagang yang akan dipindahkan
- b. Melakukan sosialisasi terhadap pedagang yang akan ditata/dipindahkan
- c. Melakukan pemindahan, penataan dan Penertiban yang berkaitan dengan pemanfaatan infrastruktur yang dibangun oleh Pemerintah yaitu sentra makanan cepat saji nuwo intan
- d. Melaporkan secara tertulis mengenai perkembangan hasil pelaksanaan pemindahan, penataan dan Penertibanpedagang

Penertiban yang dilakukan Dinas Perdagangan Kota metro mengenai suatu kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pemindahan dan Penataan untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima di daerah yang telah ditentukan yaitu yang akan dilakukan di Taman Merdeka. Dalam kaitan ini Dinas Perdagangan Kota Metro melakukan Penertiban terhadap Pedagang Kaki

Lima (PKL) yang tidak mengindahkan penataan kota serta berdagang tidak pada tempat yang telah disediakan. Penertiban ini dilakukan bersama-sama dengan Dinas Tata Kota dan Pariwisata dan aparaturnya sebagai penggerak di lapangan.

Dinas Perdagangan dan Pasar melaksanakan kegiatan Penertiban sebagai upaya untuk menyatukan atau mengintegrasikan kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga semua kegiatan yang direncanakan berjalan serentak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan bersama yaitu terciptanya ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).

Kinerja yang dilakukan aparaturnya adalah sinkronisasi yang mendukung keharusan penyesuaian unsur- unsur jumlah dan penentuan waktu kegiatan. Penyesuaian perencanaan dan keharusan adanya komunikasi yang teratur antar sesama pejabat/petugas yang bersangkutan, dan dari setiap penyelenggara Pemerintahan harus dapat memahami tugas pokok dan fungsinya yang berlaku sebagai peraturan pelaksanaan. Pelaksanaan kegiatan Penertiban dapat berupa forum diskusi, rapat pertemuan langsung dan tidak langsung yang bersifat saling memberikan informasi.

C. Taman Merdeka

1. Sejarah Taman Merdeka

Taman Merdeka terletak pada koordinat $5^{\circ} 6' 88,1''$ LS dan $105^{\circ} 18' 52,9''$ BT (Matindas, Rudolf W dan Budiman, 2011). Taman Kota secara spasial beradapada area pusat Kota Metro yang menjadi bagian dari struktur ruang kota yang memusat. Pada awalnya, ruang terbuka ini berfungsi untuk berbagai macam aktivitas termasuk untuk olahraga dan acara-acara lain yang mengundang massa yang besar. Pada perjalanannya, ruang terbuka ini diubah menjadi taman kota yang pada waktu itu masih belum dapat diakses secara bebas berada di tengah kota menjadi area publik yang saat itu hanya dimanfaatkan sebagai tempat olahraga pada pagi hari hingga tempat rekreasi untuk tempat bermain anak-anak. Melihat ketidakmaksimalan fungsi alun-alun tersebut, kemudian merencanakan mengubah fungsi alun-alun menjadi taman kota.

Kota Metro yang relatif tidak memiliki sarana rekreasi dapat sedikit terobati dengan Aneka tanaman, berbagai hiasan, tempat-tempat duduk gaya taman, dan lampu taman dihadirkan. Cukup lama alih fungsi ini menjadi kenyataan. Kemudian ketika masih berbentuk lapangan, pedagang yang beroperasi di sekitar lapangan tersebut belum seramai seperti sekarang. Artinya, pedagang-pedagang yang ada di lapangan (dulu) dan taman kota (sekarang) memang sudah ada sejak dulu. Pedagang-pedagang yang beroperasi

di ruang publik ini seperti “patah hilang tumbuh berganti”, seperti yang. Bentuk alun-alun yang dulu hanya berupa area lapang, sekarang telah berubah menjadi taman kota yang dihiasi berbagai ornamen yang kian mempercantik wajah Kota Metro. Namun, tetap saja digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Setelah dianalisis dengan menggunakan keempat indikator tersebut penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Indikator Masukan (Input) Penertiban diukur dengan indikator input melihat hal yang menunjang seperti peraturan yang dibuat untuk menertibkan PKL yaitu diberikannya Surat Edaran dari WaliKota Metro yang sudah diberikan ke pedagang tetapi belum ada dampak dari peringatan yang diberikan oleh aparatur.
2. Indikator Proses (Process) dalam proses Penertiban dengan dikuatkan oleh peraturan surat edaran maupun perda dalam Penertiban berjalan hanya sekali dalam setahun. Maka untuk pendekatan sosial kinerja aparatur terlihat belum maksimal dikarenakan belum ada tindak lanjut kepada PKL setelah dilakukannya Penertiban yang sudah dilakukan.
3. Indikator Keluaran (Output) dari hasil sosialisasi dan pendataan yang dilakukan aparatur Dinas Perdagangan tercatat 114 PKL yang harus

ditertibkan. Namun adanya penolakan tidak terlihat sampai saat ini pedagang yang tidak berdagang di taman merdeka.

4. Indikator Hasil (Outcome) hasil Penertiban yang dilakukan oleh aparatur Dinas Perdagangan akan membuat peraturan yang baru yang masih dalam tahap perencanaan. Karena surat edaran yang diberikan kepada PKL tidak berdampak apapun dan taman semakin terlihat penuh dengan PKL, jadi aparatur akan membuat peraturan yang lebih tegas. Namun hasil kegiatan Penertiban aparatur sudah melakukan sosialisasi dan pendataan PKL meskipun belum terlihat pengurangan dari PKL.

Kinerja Aparatur Dinas Perdagangan Kota Metro sudah sebagian besar terlaksana. Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang ketercapaiannya belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya bentuk kesepakatan yang terjalin antara PKL dan Aparatur Pemerintah Kota Metro. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakmampuan Dinas Perdagangan untuk menjalankan kesepakatan dan komitmennya dalam melakukan sosialisasi kepada PKL yang akan dipindahkan. Ditambah lagi dengan tidak ditetapkannya sanksi secara jelas untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan hasil pengamatan serta wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa terdapatnya hambatan yang ikut mempengaruhi proses Kinerja yang berlangsung dalam rangka kegiatan Penertiban PKL kurang nya

sosialisasi yang dilakukan ke PKL, sebab Aparatur Dinas Perdagangan hanya melakukan Penertiban satu kali dalam setahun. Kemudian dalam pengukuran masukan dalam Kinerja Aparatur belum ada kebijakan baru untuk masalah PKL pada akhirnya PKL merasa mereka tidak akan di tertibkan dan tidak adanya denda/sanksi yang diberikan. Dilihat dari indikator hasil Kinerja adanya penolakan untuk ditertibkan karena alasan PKL yang melihat taman sebagai tempat yang pas untuk berdagang karena tempat yang ramai dan strategis, hal itu menyebabkan keluaran Kinerja Aparatur tidak maksimal dan tidak terlihat pengurangan PKL sejak tahun 2017.

B. Saran

Merujuk pada simpulan di atas, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kegiatan Penertiban PKL berjalan dengan baik maka antara Dinas Perdagangan Kota Metro dapat ditempuh dengan cara yang baik jika dikaitkan dengan indikator Kinerja yang efektif tersebut, yaitu :

1. Dalam menetapkan suatu kebijakan maupun program pemerintahan, pemerintah diharapkan berorientasi kepada masyarakat. Dalam hal ini yaitu Penertiban PKL, sudah seharusnya pemerintah bertindak dengan memikirkan dampak bagi pedagang yang akan dipindahkan. Pemerintah seharusnya dapat memberikan fasilitas dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
2. Keterangan mengenai informasi terkait permasalahan PKL yang dikomunikasikan dalam rapat saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan

Kinerjayang diharapkan. Untuk itu diperlukan tindakan yang tepat dari pemerintah dalam mewujudkan Penertiban PKL. Seperti melakukan sosialisasi secara persuasif kepada para PKL, memberikan fasilitas yang memadai bagi para PKL, serta menentukan lokasi pemindahan strategis. Apabila memang tidak PKL tidak mau dipindahkan di nuwo intan maka, pemerintah diharapkan dapat melakukan promosi atau himbauan kepada seluruh masyarakat Kota Metro untuk memberitahu bahwa PKL mempunyai tempat khusus atau tempat kuliner yang baru yang lebih bersih dan terjaga lingkungan nya maka masyarakat sendiri mungkin bisa tertarik dan membuat PKL nyaman di tempat yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Sinambela, Lijan. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran dan Implikasi*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Fahmi, Irham. 2011. *Manajemen Kinerja teori dan aplikasi*. Bandung. Alfabeta.
- Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPEE.
- Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi*. Bandung. Fokusmedia.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- McGee, TG and YM Yeung, 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. IDRC Ottawa, Canada
- An-naf, Jullisar. 1993. *Pedagang Kaki Lima dengan Berbagai Permasalahannya*. Gramedia. Jakarta
- Hidayat, S. 1991, *Pola Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima*, Jakarta :Kerjasama UNPAD dan BKPM
- Moleong, L.J, 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung

Peraturan:

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima
- Peraturan Daerah No 01 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031

Peraturan Daerah No 05 Tahun 2010 Tentang Ketertiban Umum, Kebersihan Dan Keindahan Kota Metro

Surat Edaran Walikota No : 650/87/05/2006 Perihal : Kebersihan dan Keindahan Taman Merdeka

Skripsi :

Gusthio Milando. 2015 *PERAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN MERDEKA KOTA METRO*. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG .

Novia Beladina. 2014 *KOORDINASI ANTARA DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR, DINAS TATA KOTA DAN PARIWISATA, DAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA METRO DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KOTA METRO*. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK .

Nurul Fatmita Putri . 2015. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA METRO DALAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) BERBASIS PEDAGANG, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN* FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK, UNIVERSITAS LAMPUNG .

Website :

<http://www.sebatin.com/pemkot-metro-berikan-waktu-5-hari-kepada-pedagang-taman-merdeka-untuk-segera-pindah>

<https://lampungmediaonline.com/2016/10/rth-kota-metro-hanya-17-persen/>

<http://www.gentamerah.com/2017/07/taman-merdeka-kota-metro-akan>

http://www.lampost.co/artikel_detail.php?lampost=pedagang-kaki-lima-di-taman-merdeka-metro-dipindahkan

Sumber lain :

Wawancara dengan Kepala Bidang beserta Staff Dinas Perdagangan Kota Metro

bagian Pembinaan dan Penataan Pedagang pada tanggal 22 Maret 2018 pukul 10.00

WIB

Wawancara bersama Pedagang Kaki Lima Di Taman Merdeka pada 29 Maret 2018 pukul 20.00 WIB

Jurnal Skripsi :

Evaluasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Bandung

Implementasi Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45- 431/2015 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Lapangan Merdeka Balikpapan Dalam Rangka Penataan Ruang Kota

Dimensi Politik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Jongkok Di Jalan HR. Soebrantas Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2012-2013